

LKJIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



***DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR***



BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.
2. Mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur. Dasar Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 24 Tahun 2023 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

B. Aspek Strategis Organisasi

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata sebagai berikut, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan pariwisata.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi OPD

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.1 Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas Perbantuan.

Kepala Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka pendek dan jangka menengah di lingkup dinas Pariwisata.
2. Melaksanakan program dan kegiatan jangka pendek dan jangka menengah di lingkup dinas Pariwisata.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup dinas Pariwisata.
4. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkup dinas Pariwisata.
5. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis Dinas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata.
6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf agar sasaran dapat di capai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
7. Menilai prestasi staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis dinas pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi.
- b. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di dinas Pariwisata.

- c. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan bidang industri dan usaha jasa pariwisata.
- d. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- e. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan bidang pemasaran dan kerjasama.
- f. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan industri dan usaha jasa pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, Pemasaran dan kerjasama.
- g. Merencanakan evaluasi pencapaian standar nasional di bidang industri dan usaha jasa pariwisata, bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang Pemasaran dan kerjasama.
- h. Merencanakan dan berperan serta dalam perumusan kebijakan di bidang industri dan usaha jasa pariwisata, bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang Pemasaran dan kerjasama.
- i. Merencanakan dan menetapkan pelayanan umum bidang industri dan usaha jasa pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan kerjasama.
- j. Merencanakan dan menetapkan pengolahan data, penanganan masalah bidang industri dan usaha jasa pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan kerjasama.
- k. Menetapkan perizinan dan/ atau rekomendasi perizinan dan pelayanan umum bidang bidang industri dan usaha jasa pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan kerjasama serta memberikan/ menetapkan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang pariwisata Pariwisata.
- l. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan dinas pariwisata.

- m. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas pariwisata.
- n. Membina Unit Pelaksana Teknis dinas pariwisata.
- o. Membina Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya.
- q. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan.
- r. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan.
- s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretaris

Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok : membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas pariwisata yang meliputi perencanaan program dan keuangan, umum dan keuangan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan.
2. Mempelajari, menindaklanjuti informasi, data dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
3. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dinas, dokumentasi dan perpustakaan.
4. Pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
5. Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi.
6. Pengusulan program dinas pariwisata dan pelatihan aparatur/kepegawaian.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dinas pariwisata.
- c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat.
- d. Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi umum kepegawaian dan perencanaan program serta keuangan dinas pariwisata.
- e. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dalam lingkungan dinas pariwisata.
- f. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi laporan kinerja dinas pariwisata.
- g. Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/ informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas pariwisata.
- h. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/ Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja.
- i. Mensinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang-bidang.
- j. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas pariwisata.
- k. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan RKT dinas pariwisata.
- l. Mengendalikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan dinas pariwisata.
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya.
- n. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan.

- o. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan.
- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok : mengelola tatausaha, mengelola surat menyurat kearsipan, inventaris kekayaan, rumah tangga, serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas pariwisata.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Pemrosesan administrasi pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
- c. Pengumpulan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- d. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang-barang Milik Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan bahan informasi tentang kegiatan unit kerjanya;
- f. Pengkoordinasian dengan sub bagian, seksi dan instansi lain.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi barang di lingkungan dinas pariwisata;
- b. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian dinas, termasuk pengelolaan data kepegawaian, bahan mutasi serta kenaikan pangkat;
- c. Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan dinas;
- d. Melaksanakan administrasi surat-menyurat, tata laksana, dan naskah dinas;

- e. Mempersiapkan bahan pelaksanaan kehumasan, protokol, dan perjalanan dinas;
- f. Mengusulkan dan memproses pegawai untuk mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional, kursus-kursus, maupun ujian dinas pegawai;
- g. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- i. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- j. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis seksi obyek wisata, seksi produk wisata dan seksi destinasi.

Seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Seksi Obyek Pariwisata;
2. Seksi Produk Pariwisata;
3. Seksi Destinasi Pariwisata.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- b. Perumusan kebijakan dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata.

- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam seksi obyek pariwisata.
- e. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam seksi produk pariwisata.
- f. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam seksi destinasi pariwisata.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana program/kegiatan jangka pendek dan menengah dilingkup bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.
- c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan segenap Stakeholder, dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata.
- d. Mengkoordinir penyusunan peta rencana pengembangan destinasi pariwisata.
- e. Mengkoordinir penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah.
- f. Merumuskan bahan kebijakan bidang pengembangan destinasi pariwisata daerah.
- g. Menyusun bahan pengembangan sistem informasi kepariwisataan.
- h. Menginventarisir kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- i. Memantau pelaksanaan penggalan potensi dan pengembangan destinasi pariwisata.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya.

- k. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan.
- l. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan.
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis kasi promosi budaya dan pariwisata, kasi informasi pariwisata dan kasi industri pariwisata.

Seksi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata;
- b. Seksi Informasi Pariwisata;
- c. Seksi Industri Pariwisata.

Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang pemasaran dan kerjasama.
- b. Perumusan kebijakan dalam bidang pemasaran dan kerjasama.
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pemasaran dan industri pariwisata.
- d. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam seksi promosi budaya dan pariwisata.
- e. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam seksi informasi pariwisata.
- f. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam seksi industri pariwisata.

Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan jangka pendek dan menengah bidang pemasaran dan industri pariwisata sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pemasaran dan industri pariwisata.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup bidang pemasaran dan industri pariwisata.
- d. Merencanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah terkait dan swasta dalam rangka pemasaran pariwisata.
- e. Merencanakan dan mensinergikan pembuatan event-event untuk meningkatkan kunjungan wisata.
- f. Menyusun kalender event pariwisata dalam daerah, luar daerah dan luar negeri.
- g. Memantau proses penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pemasaran dan industri pariwisata.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya.
- i. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan.
- j. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan.
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan industri Pariwisata.

Bidang Kerjasama dan Usaha Jasa Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan secretariat dalam rangka menyusun Program Kerja serta Rencana Kerja bidang

Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

- b. Memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Propins, Instansi terkait dunia usaha, Kabupaten dan stake holder untuk pengembangan ekonomi kreatif.
- d. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Riset, Edukasi , pengembangan dan infrastuktur ekonomi kreatif.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif terkait akses permodalan dan pemasaran produk ekonomi kreatif.
- f. Pemberian fasilitasi pembuatan /penetapan HKI, hubungan antar lembaga dan wilayah dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif.
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan ekonomi kreatif kepada kepala dinas.
- h. Mempelajari peraturan peundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pengembangan ekonmi kreatif sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas.
- i. Membagi habis tugas pada bidang pengembangan Ekonomi Kreatif kepada bawahan agar setiap apartaur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya, dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Mempunyai tugas melaksanakan menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

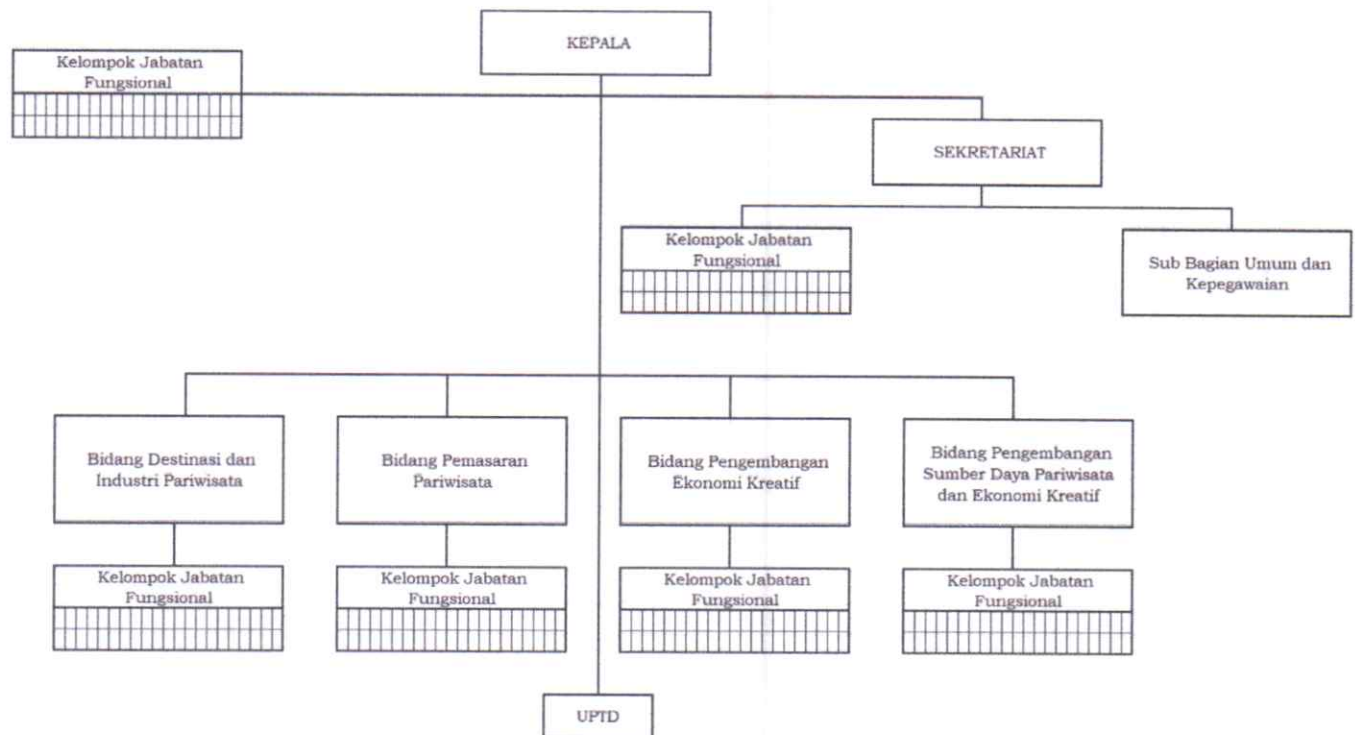
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan secretariat dalam rangka penyusunan Program Kerja Dinas sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Propinsi , instansi terkait, dunia usaha, kabupaten dan Stakeholder untuk pengembangan Sumber Daya Kepariwisata.
 - d. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hubungan kelembagaan kepariwisataan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas, dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- h. Unit Pelaksana Teknis** merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pariwisata.
- i. Kelompok jabatan Fungsional**
- a. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
 - b. Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang Lingkup bidang Tugas dan Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- d. Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- g. Rincian Tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur



C. Sumber Daya OPD

Sumber Daya yang di gunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuannya dapat dibagi sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Untuk Mencapai Visi, Misi dan Tujuannya Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur memiliki SDM, dengan jumlah 86, orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Honorer, Untuk selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1**Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025**

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1	PNS	34	40 %
2	PPPK	10	12 %
3	Honorer	41	48 %
	Jumlah	85	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pariwisata masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS dan PPPK, sebanyak 45 orang.

a. Jumlah pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) No 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, maka pengisian formasi jabatan di Dinas Pariwisata terdiri dari eselon II,III dan IV serta pejabat fungsional, yaitu dengan total sebanyak 45 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 1.2**Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur yang menduduki Jabatan Tahun 2025**

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (Orang)	%
1.	Eselon II	-	
2.	Eselon III	5	11 %
3.	Eselon IV	1	2 %
4.	Fungsional	18	40 %
4.	Staf / Pelaksana	20	44 %
Jumlah		44	100 %

b. Jumlah Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan / Pangkat

Dari 45 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Pariwisata terdapat 2 % pegawai yang berstatus golongan II, 62 % pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 13 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Gol IV	6	14 %
2.	Gol III	28	63 %
3.	Gol II	=	-
4.	Gol I	-	-
5.	PPPK	10	23 %
	Jumlah	44	100 %

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pariwisata yang ada, maka status pendidikan dengan Sarjana (S1) lebih mendominasi yaitu sebesar 67 %, Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata-3 (S3)	-	-
2.	Strata-2 (S2)	8	9 %
3.	Strata-1 (S1)	58	67 %
4.	Sarjana Muda / D3	4	5 %
5.	SLTA / SMK	15	17 %
6.	SLTP	-	-
7.	SD	-	-
	Jumlah	85	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Dinas Pariwisata 83 % tenaga dengan klasifikasi Sarjana, Magister dan Doktor. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata umumnya tingkat perguruan tinggi.

2. Sumber Daya Aset

Untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur maka diperlukan sarana dan prasarana yang baik. Secara umum Kondisi prasarana pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur cukup memadai. Bangunan Kantor yang cukup luas dan memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kabid, Para Kasi dan Kasubag memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapula ruang pendukung lainnya berupa Aula yang sekaligus digunakan sebagai 'pojok informasi' untuk penyampaian informasi mengenai pariwisata Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat luas, dan juga ada Ruang Dapur, Musholla, WC, Ruang Arsip dan Ruang rapat sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

Adapun sarana pendukung pada Dinas Pariwisata masih memerlukan penambahan-penambahan dalam rangka mendukung kinerja OPD agar semakin baik. Secara lengkap gambaran kondisi sarana dan prasarana ditampilkan dalam tabel yang terlampir.

3. Sumber Daya Keuangan

Anggaran Belanja Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besar anggaran belanja Dinas Pariwisata tahun 2025 sebesar Rp. **28.298.378.504,-**

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja pada tahun 2019-2025, sebagai berikut :

Tabel 1.5
Anggaran dan Realisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2019	4.622.514.408,-	4.105.985.739,-	88.83 %
2020	3.891.632.307,-	3.747.968.570,-	96.31 %
2021	13.689.597.796,-	13.032.796.554	95,20 %
2022	46.053.048.056,-	37.655.00.445,-	81,76 %
2023	139.853.013.831,-	111.346.014.096,-	79,62 %
2024	186.609.484.680,-	168.040.463.258,96	90.05 %
2025	28.298.378.504.-	25.764.224.830.-	91.04 %

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Tahun 2025 ini, mengacu pada :

1. Peraturan Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 1999, aspek akuntabilitas menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis kinerja dan tata cara Review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

A.1. Visi dan Misi

1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata

Dalam rangka mendukung Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, pada misi 2, Tujuan 2, sasaran 1 (M2,T2,S1) dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur menetapkan Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Timur Sebagai Destinasi Pariwisata dan Berkembangnya Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

1. **Terwujudnya Kutai Timur sebagai daerah tujuan pariwisata yang berdaya saing** adalah menggambarkan suatu semangat untuk mengelola kepariwisataan Kutai Timur yang memiliki keunggulan komparatif dari aspek pengelolaan dan tujuan wisata sehingga dapat bersaing dengan daerah lain yang lebih maju serta dapat bersaing dalam tataran lingkungan global.

2. **Ekonomi Kreatif** adalah kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh industri kreatif pada Kabupaten Kutai Timur yang mengutamakan peranan kekayaan intelektual sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. **Berdaya saing**, memiliki keunggulan komparatif kompetitif dengan daerah tujuan wisata lainnya;
4. **Berkelanjutan**, pembangunan pariwisata berkesinambungan sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dan Visi Dinas Pariwisata, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

1. **Mengembangkan dan Meningkatkan daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang berdaya saing.**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur yang berdaya saing. Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan Kutai timur diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola kepariwisataan, obyek wisata, pemasaran pariwisata dan juga meliputi pembangunan sarana prasarana pariwisata.

2. **Pengembangan produk pariwisata dan ekonomi kreatif**

Industri pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Timur harus dikelola secara profesional sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Meningkatnya kunjungan wisatawan yang tinggi akan berdampak positif pada peningkatan PDRB sektor pariwisata. Dengan demikian sektor pariwisata menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan misi ini antara lain: meningkatkan jumlah usaha pariwisata yang terdiri dari transportasi pariwisata, *tour guide*, *mice*, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata; meningkatkan Jumlah usaha sarana pariwisata (akomodasi, restoran/rumah makan, dan lainnya);

3. Meningkatkan penyelenggaraan dan pariwisata yang profesional dan akuntabel

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata yang mengemban urusan penyelenggaraan kebudayaan dan pariwisata diperlukan dukungan operasional yang andal terhadap pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, kepegawaian dan fungsi perencanaan OPD sehingga dapat berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan OPD harus dikelola sesuai asas umum pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

A.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai Berikut :

1. Tujuan

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas maka telah ditetapkan 3(tiga) tujuan strategis sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kepariwisataan Kutai timur yang berdaya saing.;
- b) Meningkatnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian daerah;
- c) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian;

2. Sasaran

Berdasarkan 3 (tiga) tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran - sasaran sebagai penjabaran dari tujuan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tujuan meningkatnya kepariwisataan Kutai Timur yang berdaya saing dijabarkan menjadi tiga sasaran strategis, yaitu:
 - 1) Terpeliharanya obyek wisata;
 - 2) Meningkatnya prasarana dan sarana obyek wisata;
 - 3) Meningkatnya kualitas Sumber Daya pariwisata;
- b. Tujuan meningkatnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian daerah dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:
 - 1) Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata;
 - 2) Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya dan iptek
- c. Tujuan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian Dinas Pariwisata dijabarkan menjadi lima sasaran strategis, yaitu:
 - 1) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas pariwisata;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dan kepegawaian Dinas Pariwisata.
 - 3) Meningkatnya Kapasitas Aparatur.
 - 4) Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Pariwisata.
 - 5) Meningkatnya administrasi perkantoran Dinas Pariwisata.

A.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan arah dan strategi kebijakan program pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Ruang Lingkup Kebijakan dan Program Bidang Kepariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ruang Lingkup Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur

Sasaran	Strategi	
	Kebijakan	Program
Terpeliharanya obyek wisata	Meningkatkan daya saing obyek wisata yang bertaraf internasional, nasional dan regional/lokal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Meningkatnya prasarana dan sarana obyek wisata	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pariwisata secara terus menerus serta peningkatan kuantitas dan kualitas obyek wisata di Kutai timur	
Meningkatnya pemasaran Pariwisata	Meningkatkan mutu pemasaran baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri secara intensif dan pro pasar	Program Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya dan iptek	Mengembangkan industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya melalui pelatihan pelaku ekonomi kreatif dan peningkatan sertifikasi kompetensi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya dan berbasis media, desain, dan iptek	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata	Meningkatkan jumlah usaha pariwisata; jumlah usaha sarana pariwisata; serta meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap perkembangan kepariwisataan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata	Pengelolaan keuangan OPD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dan kepegawaian Dinas Pariwisata	Tata kelola aset dan kepegawaian berdasarkan pada kaidah pengelolaan aset dan kepegawaian yang baik (best practice) dan taat pada peraturan perundangan yang berlaku	
Meningkatnya Kapasitas Aparatur	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi	
Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Pariwisata	Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja OPD melalui peningkatan desain, dan iptek	
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Pariwisata	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan tersedianya data, perlengkapan dan gedung kantor.	

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di daerah.	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Kunjungan Wisata	975 Orang
		Program Pemasaran Pariwisata	Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 event
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	2 lokasi
		Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1450 Orang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kutai Timur melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021 - 2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1
SKALA PENILAIAN KATEGORI CAPAIAN

NO.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan,
2	A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi, dan Sangat Akuntabel
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal
4	B	> 60 – 70	Baik, Akuntabilitas Kinerjanya Sudah Baik, Memiliki Sistem Yang Dapat Digunakan Untuk Manajemen Kinerja, dan Perlu Sedikit Perbaikan
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas Kinerjanya Cukup Baik, Taat Kebijakan, Memiliki Sistem Yang Dapat Digunakan Untuk Memproduksi Informasi Kinerja Untuk Pertanggung Jawaban. Perlu Banyak Perbaikan Tidak Mendasar
6	C	> 30 – 50	Kurang, Sistem dan Tataan Kurang Dapat Diandalkan, Memiliki Sistem Untuk Manajemen Kinerja Tapi Perlu Banyak Perbaikan Minor dan Perbaikan Yang Mendasar
7	D	> 0- 30	Sangat Kurang, sistem dan Tataan Tidak Dapat Diandalkan Untuk Penerapan Manajemen Kinerja, Perlu Banyak perbaikan, Sebagian Perubahan Yang Sangat Mendasar

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026 maupun RKPD Tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bila dilihat berdasarkan pencapaian sasaran - sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	%	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di daerah.	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Kunjungan Wisata	975 Orang	386.458 Orang	1000+%	AA
		Program Pemasaran Pariwisata	Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Event	5 event	125%	AA
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	2 Lokasi	Pengembangan ekraf : 8 Lokasi HAKI : 4 lokasi	600 %	AA
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1450 Orang	206 Orang	14,20 %	D
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100 %	91.04 %	91.04 %	AA

Secara umum, capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **bervariasi namun cenderung positif**, dengan sebagian besar indikator mencapai kategori **Sangat Baik (AA)**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis daerah, meskipun masih terdapat indikator tertentu yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

1. 1. Indikator Kunjungan Wisata

Indikator kunjungan wisata menunjukkan **capaian kinerja yang sangat tinggi**, dengan realisasi jauh melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa program peningkatan daya tarik wisata berjalan sangat efektif dan mampu mendorong peningkatan aktivitas pariwisata secara signifikan.

Capaian yang sangat tinggi ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi pariwisata daerah. Namun demikian, perbedaan yang sangat besar antara target dan realisasi juga menunjukkan bahwa **penetapan target belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil sektor pariwisata**, sehingga ke depan diperlukan penyesuaian target agar lebih proporsional dan akurat.

2. 2. Indikator Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Indikator event pariwisata menunjukkan **capaian sangat baik**, dengan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran pariwisata melalui penyelenggaraan event dapat dilaksanakan secara optimal dan bahkan melampaui rencana awal.

Keberhasilan pelaksanaan event pariwisata ini memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan promosi dan citra pariwisata daerah, serta berperan sebagai faktor pendukung utama meningkatnya kunjungan wisata. Indikator ini mencerminkan kinerja output yang efektif dan berdampak langsung pada pencapaian outcome sektor pariwisata.

3. 3. Indikator Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator pengembangan ekonomi kreatif dan perlindungan hak kekayaan intelektual menunjukkan **kinerja sangat tinggi**, dengan realisasi pengembangan yang jauh melampaui target. Hal ini menggambarkan bahwa program pengembangan ekonomi kreatif memiliki daya jangkauan dan tingkat partisipasi yang tinggi.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya fasilitasi dan pendampingan ekonomi kreatif berjalan dengan baik dan mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif di berbagai lokasi. Namun demikian, capaian yang sangat tinggi juga mengindikasikan perlunya **penajaman target pada periode perencanaan berikutnya** agar lebih mencerminkan kapasitas dan potensi aktual sektor ekonomi kreatif.

4. 4. Indikator Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berbeda dengan indikator lainnya, indikator jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan **capaian yang masih rendah**. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih menghadapi berbagai tantangan.

Capaian yang rendah menunjukkan bahwa indikator ini bersifat lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan jangka menengah hingga panjang. Pengembangan pelaku usaha tidak hanya bergantung pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada kesiapan pelaku, ketersediaan sumber daya, serta dukungan lintas sektor. Indikator ini menjadi salah satu area yang perlu mendapatkan perhatian lebih pada periode perencanaan selanjutnya.

5. 5. Indikator Persentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

Indikator persentase tata kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan menunjukkan **kinerja sangat baik**, dengan capaian mendekati target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa aspek tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, telah berjalan dengan baik.

Tata kelola yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program strategis. Meskipun belum mencapai 100 persen, capaian ini

menunjukkan bahwa sistem administrasi dan pelaporan telah berada pada kondisi yang stabil dan efektif.

Secara keseluruhan, dari 5 indikator kinerja yang dinilai, 4 indikator menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan (kategori AA), sementara 1 indikator memerlukan perhatian serius (kategori D). Meskipun demikian, capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 secara umum sangat baik dan menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut.

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran, sebagaimana telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran :

Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Membandingkan Antara Target Dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2024	TAHUN 2025			
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kunjungan Wisata	94.93	975 Orang	386.458 Orang	1000+%	AA
2	Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	10	4 Event	5 event	125%	AA
3	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	0	2 Lokasi	Pengembangan ekraf : 8 Lokasi HAKI : 4 lokasi	600 %	AA
4	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	34	1450 Orang	206 Orang	14,20 %	D
5	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Rp. 19.193.192.680,-	100 %	91.04 %	91.04 %	AA

Tabel 3.4
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN LALU		PERSENTASE KENAIKAN / PENURUNAN REALISASI TAHUN 2025 VS TAHUN	
			2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kunjungan Wisata	386.458 Orang	100	94.93	100+%	100+ %
2	Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 event	30	10	-83%	-50%
3	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekraf : 8 Lokasi HAKI : 4 lokasi	5	0	+140%	100+%
4	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	206 Orang	31	3230	+564%	-93%
5	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	91.04 % / Rp. 25.764224.830,-	Rp. 16.903.302.624,-	Rp. 19.193.192.680,-	+52%	+34%

Tabel 3.5

**Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

N O	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2025	TARGET RPJMD TAHUN		PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN	
			2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kunjungan Wisata	386.458 Orang	97,2	975 Orang	39%	39%
2	Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 event	4	4 Event	125%	125%
3	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekraf : 8 Lokasi HAKI : 4 lokasi	1	2 Lokasi	1200%	600%
4	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	206 Orang	11	1450 Orang	1.873%	14.20%
5	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	91.04 % / Rp. 25.764224.830,-	Rp. 9.012.496.500,-	100 %	349%	91%

Tabel 3.6

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di daerah	366.05 %	91.04 %	402.02%

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Berdasarkan data dalam tabel efisiensi, berikut adalah analisisnya:

1. Persentase Capaian Kinerja:

- Sebesar 366.05%, menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan

2. Persentase Penyerapan Anggaran:

- Sebesar 91.04%, artinya 91.04% dari total anggaran yang dialokasikan telah digunakan

3. Tingkat Efisiensi: Untuk menghitung tingkat efisiensi, kita menggunakan rumus:
Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja / % Penyerapan Anggaran * 100

Perhitungan: Tingkat Efisiensi = $366.05 / 91.04 * 100 = 4.02 * 100 = 402\%$

Kesimpulan:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 366.05%, melampaui target yang ditetapkan.
2. Penyerapan anggaran sebesar 91.04 % menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah digunakan.
3. Tingkat efisiensi sebesar 402.02% menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata sangat efisien dalam menggunakan sumber dayanya. Setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menghasilkan output sebesar 4.02 kali lipat.
4. Dengan tingkat efisiensi di atas 100%, hal ini menunjukkan penggunaan sumber daya yang sangat efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja.

Rekomendasi: Meskipun sudah sangat efisien, Dinas Pariwisata perlu memperhatikan:

1. Mekanisme penyerapan anggaran agar bisa lebih optimal (saat ini 91.04%)
2. Memastikan bahwa kelebihan capaian kinerja dibandingkan target benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
3. Menjaga konsistensi kinerja yang tinggi di masa mendatang

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ketiga dari Rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Secara Umum Memuaskan

- Dari 5 indikator kinerja utama yang diukur, sebagian besar menunjukkan pencapaian sangat memuaskan (kategori AA).
- Indikator seperti Kunjungan Wisata, Event Pariwisata, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan melampaui target RPJMD dengan persentase capaian di atas 100%.
- Namun, ada satu indikator yang tidak tercapai, yaitu Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan realisasi 14.20% dari target.

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran Sangat Baik

- Tingkat efisiensi mencapai 402.02%, yang menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan menghasilkan output signifikan. Hal ini didukung

oleh tingginya persentase capaian kinerja (366.05%) dibandingkan penyerapan anggaran (91.054%).

3. Peningkatan Signifikan Dibanding Tahun Sebelumnya

- Capaian tahun 2025 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023), terutama dalam hal jumlah kunjungan wisatawan, event pariwisata, dan pengembangan kelompok sadar wisata.

4. Masih Ada Area yang Perlu Diperbaiki

- Meskipun secara keseluruhan capaian sangat baik, masih ada tantangan dalam pengembangan infrastruktur kepariwisataan yang belum terealisasi sama sekali pada tahun 2025.

5. Dampak Positif pada Ekonomi Lokal

- Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan event pariwisata memberikan dampak positif pada perekonomian lokal, sesuai dengan misi meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.

Rekomendasi untuk Perbaikan di Masa Mendatang

1. Fokus pada Pengembangan Infrastruktur Kepariwisata

- Masalah : Realisasi 0% untuk indikator Jumlah Penyediaan, Pengembangan Infrastruktur Kepariwisata menunjukkan adanya hambatan serius dalam pelaksanaan program ini.

- Rekomendasi :

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target infrastruktur.
- Mengalokasikan anggaran khusus untuk proyek-proyek infrastruktur prioritas di tahun mendatang.
- Melibatkan pihak swasta atau investor melalui skema kerjasama publik-swasta (KPS) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- Masalah : Meskipun SDM di Dinas Pariwisata mayoritas berpendidikan tinggi (83% sarjana, magister, dan doktor), namun masih ada ruang untuk peningkatan kapasitas teknis dan manajerial.

- Rekomendasi :

- Mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur di bidang manajemen kinerja, akuntabilitas, dan sistem informasi pariwisata.
- Memberikan insentif kepada pegawai yang menunjukkan inovasi dan kontribusi nyata dalam pengembangan pariwisata.

3. Optimalisasi Anggaran

- Masalah : Penyerapan anggaran hanya mencapai 90.05%, meskipun tingkat efisiensi sangat tinggi.

- Rekomendasi :

- Meningkatkan perencanaan anggaran yang lebih matang agar alokasi dana dapat terserap sepenuhnya tanpa mengorbankan efisiensi.
- Melakukan monitoring berkala terhadap realisasi anggaran untuk memastikan semua program berjalan sesuai jadwal.

4. Penguatan Kolaborasi Antar Stakeholder

- Masalah : Beberapa program memerlukan dukungan dari pihak eksternal, seperti masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.

- Rekomendasi :

- Membangun sinergi yang lebih kuat dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan komunitas lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata.
- Mengadakan forum kolaborasi rutin untuk membahas strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata

- Masalah : Meskipun jumlah kunjungan wisatawan meningkat, potensi pasar pariwisata luar negeri belum sepenuhnya dimanfaatkan.

- Rekomendasi :

- Mengintensifkan promosi pariwisata melalui platform digital dan media sosial untuk menjangkau pasar internasional.
- Menyusun kalender event pariwisata tahunan yang lebih terstruktur dan menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

6. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan

- Masalah : Beberapa indikator menunjukkan fluktuasi signifikan antar tahun, yang menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam.

- Rekomendasi :

- Menerapkan sistem monitoring real-time untuk memantau perkembangan capaian kinerja secara berkala.
- Menyusun laporan triwulanan untuk mengidentifikasi masalah lebih dini dan mengambil langkah antisipatif.

7. Penguatan Data dan Teknologi Informasi

- Masalah : Belum ada informasi detail tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pariwisata.

- Rekomendasi :

- Mengembangkan sistem informasi kepariwisataan berbasis digital untuk mempermudah akses informasi bagi wisatawan.
- Menggunakan big data untuk menganalisis tren kunjungan wisatawan dan merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.

8. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan

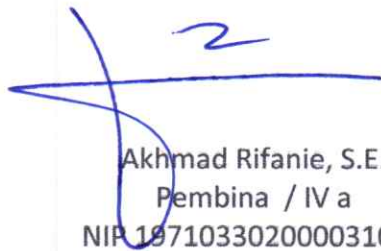
- Masalah : Terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dan target pada beberapa indikator (misalnya, infrastruktur kepariwisataan).

- Rekomendasi :

- Melakukan review menyeluruh terhadap dokumen RPJMD dan RKPD untuk memastikan target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai.
- Melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik secara keseluruhan. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang, perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap area-area yang masih menjadi tantangan, terutama dalam pengembangan infrastruktur kepariwisataan dan optimalisasi anggaran. Dengan implementasi rekomendasi di atas, diharapkan Dinas Pariwisata dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR



Akhmad Rifanie, S.E.
Pembina / IV a
NIP. 197103302000031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Demmy Adhitia Herwanto, SE.**
NIP : **19820224 200901 1 004**
Jabatan : **Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd**
NIP : **19651112 198903 1 019**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Maret 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 19651112 198903 1 019

Pihak Pertama
**Kabid. Destinasi dan Industri
Pariwisata,**

Demmy Adhitia Herwanto, SE.
Penata Tk. I / III d
NIP 19820224 200901 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya rata - rata kunjungan pada desa wisata	1	Jumlah kunjungan wisata	975 Orang

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 20,032,294,404	
	2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 46,767,539,659	
	3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Rp 499,889,000	
Total Anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			Rp 67,299,723,063	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Tingkat I / IV b
NIP 19641005 198602 1 005

Sangatta, Maret 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Destinasi dan Industri Pariwisata,

Demmy Adhitia Herwanto, SE.
Penata TK. I / IIId
NIP 19820224 200901 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunita Ronting, SE, M.Si.
NIP : 19770321 200801 2 020
Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
NIP : 19651112 198903 1 019
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Maret 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 19651112 198903 1 019

Pihak Pertama
Kabid. Pemasaran Pariwisata,

Yunita Ronting, SE, M.Si.
Pembina / IVa
NIP 19770321 200801 2 020



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pemasaran pariwisata	1	Event Pariwisata dalam dan Luar Negeri	4 Event

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 8,999,998,500	
	Total Anggaran Program Pemasaran Pariwisata		8,999,998,500	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,



Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Tingkat I / IV b
NIP 19641005 198602 1 005

Sangatta, Maret 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Pemasaran Pariwisata,



Yunitha Ronting, SE, M.Si.
Pembina / IV a
NIP 19770321 200801 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Akhmad Rifanie, SE.**
NIP : **19710330 200003 1 007**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd**
NIP : **19651112 198903 1 019**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Maret 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 19651112 198903 1 019

Pihak Pertama
**Kabid. Pengembangan
Ekonomi Kreatif,**

Akhmad Rifanie, SE.
Penata Tk. I / III d
NIP 19710330 200003 1 007



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	1	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	2 lokasi

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
	1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp 13,299,999,590	
Total Anggaran Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			Rp 13,299,999,590	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Tingkat I / IV b
NIP 19641005 198602 1 005

Sangatta, Maret 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif,

Akhmad Rifanie, SE
Penata Tk. I / IIId
NIP 19710330 200003 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dian Anggraeni, SE, MM.**

NIP : **19780712 200604 2 029**

Jabatan : **Kabid. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Nurullah, M.Pd**

NIP : **19651112 198903 1 019**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Maret 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

Dr. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 19651112 198903 1 019

Pihak Pertama
**Kabid. Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,**

Dian Anggraeni, SE, MM.
Pembina / IVa
NIP 19780712 200604 2 029



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1450 Orang

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp 1,000,000,000	
	2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp 5,430,000,000	
Total Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			6,430,000,000	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Tingkat I / IV b
NIP 19641005 198602 1 005

Sangatta, Maret 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Dian Anggraeni, SE, MM.
Pembina / Iva
NIP 19780712 200604 2 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Satriani, SE, MM.**

NIP : **19760825 200112 2 002**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd**

NIP : **19651112 198903 1 019**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Maret 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

Dr. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 19651112 198903 1 019Pihak

Pertama
Sekretaris,

Satriani, SE, MM.
Pembina / IVa
NIP 19760825 200112 2 002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	1	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 811,286,819	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 14,904,620,416	
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 221,364,000	
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 362,985,020	
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 919,955,820	
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1,193,839,000	
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 382,875,688	
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,519,017,500	
Total Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota			Rp 21,315,944,263	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Dr.Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Tingkat I / IV b
NIP 19641005 198602 1 005

Sangatta, Maret 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris,

Satriani, SE, MM.
Pembina / IV a
NIP 19760825 200112 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd**
NIP : **19651112 198903 1 019**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Ardiansyah Sulaiman**
Jabatan : **Bupati Kutai Timur**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 20 November 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur,


Ardiansyah Sulaiman

Pihak Pertama
Kepala Dinas,


Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Paraf		
Nama	Jabatan	Paraf
Rizali Hadi	Sekretaris Daerah	
Trisno, SSTP	PLT. Asisten Pemkesra	
Dr.Drs.Nurullah, MPd	Kepala Dinas	



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah	1	Kunjungan Wisata	975 Orang
		2	Event Pariwisata dalam dan Luar Negeri	4 Event
		3	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	2 lokasi
		4	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1450 Orang
		5	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%

NO	PROGRAM	Anggaran (Rp)		Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	16,403,444,874	
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp	4,100,977,500	
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp	1,720,449,000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp	1,617,779,000	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp	4,455,728,130	
Total		Rp	28,298,378,504	

Pihak Kedua,
BUPATI,

Ardiansyah Sulaiman

Sangatta, 20 Nvember 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Demmy Adhitia Herwanto, SE.**
NIP : **19820224 200901 1 004**
Jabatan : **Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd**
NIP : **19651112 198903 1 019**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 20 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Pihak Pertama
**Kabid. Destinasi dan Industri
Pariwisata,**

Demmy Adhitia Herwanto, SE.
Penata Tk. I / III d
NIP 19820224 200901 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya rata - rata kunjungan pada desa wisata	1	Jumlah kunjungan wisata	975 Orang

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 199,000,000	
	2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 3,812,372,500	
	3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Rp 89,605,000	
Total Anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			Rp 4,100,977,500	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Sangatta, 20 Nvember 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Destinasi dan Industri Pariwisata,

Demmy Adhitia Herwanto, SE.
Penata TK. I / III d
NIP 19820224 200901 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dian Anggraeni, SE, MM.**

NIP : **19780712 200604 2 029**

Jabatan : **Kabid. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Nurullah, M.Pd**

NIP : **19651112 198903 1 019**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 20 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

Dr. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Pihak Pertama
**Kabid. Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,**

Dian Anggraeni, SE, MM.
Pembina / IV a
NIP 19780712 200604 2 029



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1450 Orang

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp 440,310,000	
	2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp 1,177,469,000	
Total Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1,617,779,000	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Sangatta, 20 Nvember 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Dian Anggraeni, SE, MM.
Pembina /IV a
NIP 19780712 200604 2 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Akhmad Rifanie, SE.**
NIP : **19710330 200003 1 007**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd**
NIP : **19651112 198903 1 019**
Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 20 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Pihak Pertama
**Kabid. Pengembangan
Ekonomi Kreatif,**

Akhmad Rifanie, SE.
Penata Tk. I / III d
NIP 19710330 200003 1 007



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	1	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	2 lokasi

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
	1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp 4,455,728,130	
Total Anggaran Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			Rp 4,455,728,130	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Sangatta, 20 Nvember 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif,

Akhmad Rifanie, SE
Penata Tk. I / III d
NIP 19710330 200003 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Satriani, SE, MM.**

NIP : **19760825 200112 2 002**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd**

NIP : **19651112 198903 1 019**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 20 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

Dr. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Pertama
Sekretaris,

Satriani, SE, MM.
Pembina Tk. I / IV b
NIP 19760825 200112 2 002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	1	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 117,771,055	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 13,586,594,563	
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 109,160,000	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 459,711,902	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 989,319,000	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 879,099,590	
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 261,788,764	
Total Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota			Rp 16,403,444,874	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Dr.Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Sangatta, 20 Nvember 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris,

Satriani, SE, MM.
Pembina Tk. I / IV b
NIP 19760825 200112 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunita Ronting, SE, M.Si.
NIP : 19770321 200801 2 020
Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
NIP : 19651112 198903 1 019
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 20 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Pihak Pertama
Kabid. Pemasaran Pariwisata,

Yunita Ronting, SE, M.Si.
Pembina / IV a
NIP 19770321 200801 2 020



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pemasaran pariwisata	1	Event Pariwisata dalam dan Luar Negeri	4 Event

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 1,720,449,000	
	Total Anggaran Program Pemasaran Pariwisata		1,720,449,000	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Dr. Drs. H. Nurullah, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19651112 198903 1 019

Sangatta, 20 Nvember 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Pemasaran Pariwisata,

Yunitha Ronting, SE, M.Si.
Pembina / IV a
NIP 19770321 200801 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	%	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di daerah.	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Kunjungan Wisata	975 Orang	386.458 Orang	1000+%	AA
		Program Pemasaran Pariwisata	Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Event	5 event	125%	AA
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual	2 Lokasi	Pengembangan ekraf : 8 Lokasi HAKI : 4 lokasi	600 %	AA
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1450 Orang	206 Orang	14,20 %	D
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100 %	91.04 %	91.04 %	AA

Sangatta, 24 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas,



Akhmad Rifanie, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP 197103302000031007

DATA PENGUNJUNG OBJEK WISATA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA OBJEK WISATA	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	TELUK PRANCIS DAN MAGROVE SEI PAPAN	72	145	48	548	215	246	215	320	188	210	289	570	3.066
2	PANTAI JEPU-JEPU	7.000	500	300	18.000	700	450	550	1.500	700	500	600	8.000	38.800
3	PANTAI NAJWA	900	200	150	1.200	150	100	180	150	120	150	200	500	4.000
4	SANGKIMA BEACH & TELUK KABBA	TUTUP	TUTUP	TUTUP	7.011	0	0	0	659	1.523	1.765	2.754	750	14.462
5	PULAU MIANG	931	739	910	556	768	660	667	935	894	987	1.246	1.238	10.531
6	MATA AIR TANGGA BIDADARI	1.500	350	250	3.500	300	350	320	700	400	350	450	3.000	11.470
7	EMBUNG WISATA SUKA MAJU KONGBENG	5.530	1.740	4.834	35.654	3.562	3.756	2.659	4.349	1.312	1.953	9.879	4932	80.160
8	DANAU LELHUT	400	80	50	1.230	0	0	0	159	27	21	37	123	2.127
9	PANTAI SEKERAT	2.500	1.000	600	3.500	520	5.975	458	750	537	350	675	1.324	18.189
10	PANTAI MARANG	2.135	1.015	465	8.048	2.302	3.068	2.444	22.254	4.145	2.468	1.951	3.205	53.500
11	DESA BATU LEPO'(JEMBATAN WARNA-WARNI DAN PEMANDIAN AIR PANAS)	0	0	0	3.973	563	945	308	771	299	328	385	1.449	9.021
12	DANAU SENAL	405	330	120	389	79	156	217	124	181	152	213	395	2.761
13	BUKIT HIJAU KANDOLO	565	350	105	863	205	410	195	315	402	215	327	410	4.362

14	WATHERBOOM NILA JAYA	456	160	960	447	218	406	210	145	277	305	318	892	4.794
15	AIR TERJUN AIR PUTIH DAN AGROWISATA	0	0	0	0	0	604	383	234	202	176	432	617	2.648
16	MANGROVE DESA MARUKANGAN	456	160	960	447	368	154	217	576	380	534	436	959	5.647
17	KEBUN KELULUD	64	484	40	35	465	100	55	25	134	152	259	457	
18	BUMI JAYA PARK KAUBUN DAN PUSAT KULINER	0	0	0	16.620	15.010	16.328	11.462	19.138	12.782	12.958			104.298
19	SUSUR SUNGAI SANGATTA	0	0	0	0	0	4	8	42	41	0	0	3	98
20	WISATA SAWAH DESA TELUK PANDAN	1.050	1.350	1.500	1.555	1.439	1.710	1.607	1.493	1.350	1.455	1.169	1.508	17.186
21	MANGROVE TUNGKAP DESA SAKA	0	0	0	811	576	718	658	491	573	729	675	815	6.046
22	TELUK LOMBOK	2.200	900	1.200	4.950	482	480	434	715	613	540	478	1.250	14.242
23	GOA SAMPEMARTA	5	12	0	16	56	31	53	65	42	68	60	53	461
24	AGROWISATA SAWAH BHUANASARI	3.361	1.798	876	1.546	1.600	2.269	1.876	1.224	1.084	912	902	1.454	18.902
TOTAL		29.530	11.313	13.368	110.899	29.578	38.920	25.176	57.134	28.206	27.278	23.735	33.904	426.771

Susur Sungai Sangatta :mancanegara 11 org bulan agustus (Jerman 5 orang, spanyol 4 org,belgia 2 org, Belanda 1 org)
Susur Sungai Sangatta : Spetember 8 orang (Belanda 5 org, Italia 3 org)

Mengetahui

Pt Kepala Dinas



Akhmad Rifani, SE

NIP 19710302000031007

Sangatta, 20 Februari 2026
Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata

Demmy Adhitha Herrwanto, SE

NIP 1982202242009011004



INDIKATOR KINERJA
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025

No	Nama Event	Tanggal	Lokasi
Jumlah Promosi Event Daerah yang terlaksana di Dalam Negeri			
1	HUT Kutim	10 - 18 Oktober 2025	Sangatta
Jumlah Event Luar Daerah yang diikuti Kabupaten/Kota			
1	TOMOHON EXPO 2025 - Tourism, Trade, Investment, Floriculture	08 - 12 Agustus 2025	Tomohon
2	APKASI	27 - 31 Agustus 2025	Tangerang
3	ITTIE Prioritas Batam	12 - 18 November 2025	Batam
4	ITTIE Prioritas Bali	26 - 30 November 2025	Bali
Jumlah Promosi Event Daerah yang diikuti di Luar Negeri			
1	-	-	-
2	-	-	-

Sangatta, 15 Januari 2026

Kepala Bidang,

Yunita Ronting, SE.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19770321 200801 2 020

Plt. Kepala Dinas,



Akhmad Rifanie, SE
Pembina (IV/a)
NIP 197103302000031007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl.Prof. Dr.Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kutai Timur,Kalimantan Timur 75683
laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

KEGIATAN PELATIHAN/BIMTEK/SERTIFIKASI UNTUK PELAKU USAHA PARIWISATA DAN PELAKU EKRAF YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025

Sub Kegiatan : Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata

KABUPATEN KUTAI TIMUR										
NO.	SDM	PELATIHAN / BIMTEK	JUMLAH PESERTA		LOKASI	TGL PELAKSANAAN	SERTIFIKASI		Total Peserta	
			Perempuan	Laki-laki			YA	TIDAK		
1	PELAKU USAHA PARIWISATA	Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Keselamatan Wisata Tirta 2025	9	14	Sangatta/Pulau Miang Sangkulirang	18 - 21 November 2025	V		23	
2		Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Wisata Arung Jeram 2025	9	14	Sangatta/Sungai Seleq Kec Kongbeng	24 - 27 November 2025	V		23	
TOTAL									46	

Pit, Kepala Dinas,



Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PARIWISATA

Jl.Prof. Dr.Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kutai Timur,Kalimantan Timur 75683
Jaman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el dispar@kutaitimurkab.go.id

KEGIATAN PELATIHAN/BIMTEK/SERTIFIKASI UNTUK PELAKU USAHA PARIWISATA DAN PELAKU EKRAF YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025

Sub Kegiatan : Pelatihan Bimbingan Teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif

KABUPATEN KUTAI TIMUR									
NO.	SDM	PELATIHAN / BIMTEK	JUMLAH PESERTA		LOKASI	TGL PELAKSANAAN	SERTIFIKASI		Total Peserta
			Perempuan	Laki-laki			YA	TIDAK	
1	PELAKU EKONOMI KREATIF	Pelatihan Berbasis Digital Kecamatan Sangatta Utara	6	26	Hotel Royal Victoria Sangatta	24 - 26 November 2025		✓	32
2		Pelatihan Berbasis Digital Kecamatan Sangatta Selatan	21	11	Hotel Royal Victoria Sangatta	24 - 26 November 2025		✓	32
3		Pelatihan Berbasis Digital Kecamatan Teluk Pandan	20	12	Hotel Royal Victoria Sangatta	26 - 28 November 2025		✓	32
4		Pelatihan Berbasis Digital Kecamatan Rantau Pulung	23	9	Hotel Royal Victoria Sangatta	26 - 28 November 2025		✓	32
5		Pelatihan Berbasis Digital Kecamatan Bengalon	20	12	Hotel Royal Victoria Sangatta	26 - 28 November 2025		✓	32
TOTAL									160

Plt, Kepala Dinas,



Kepala Bidang
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Dian Anggraeni, SE, MM
NIP 1978071220006042029



KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA
Jln. Prof. Dr. Sudatmo Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi
SANGATTA

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	LOKASI
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
KEGIATAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF			
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual			
1	Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif:	15 Juli - 29 November 2025	Kecamatan Sangatta Utara, Kec. Kaubun Kec. Kaliurang dan Kecamatan Sangkulirang

Permasalahan dan Upaya Mengatasi yang dihadapi pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif antara lain :

1. Masih kurangnya informasi kepada masyarakat terkait pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
2. Mengadakan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual ke 18 Kecamatan di Kutai Timur
3. Perlunya kolaborasi antara sesama organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa , pelaku ekonomi kreatif , komunitas pariwisata dan masyarakat .





KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA
Jln. Prof. Dr. Sudiatmo Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi
SANGATTA

NO	NAMA EVENT PARIWISATA	TANGGAL	LOKASI
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
KEGIATAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF			
Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Pemasaran			
1	Festival Adat dan Budaya Lom Plai	24 S/D 27 APRIL 2025	Desa Nehas Liah Bing Kec. Muara Wahau
2	Festival Sekerat Nusantara	23 S/D 25 JULI 2025	Desa Sekerat Kec. Bengalon
3	Festival Budaya UFAH Miau Baru	09 S/D 12 AGUSTUS 2025	Desa Miau Baru Kec. Kongbeng
4	Festival Pesona Kaliorang	27 S/D 29 AGUSTUS 2025	Desa Kaliorang Kec. Kaliorang
5	Festival Tanjung Bahari Muara Bengalon	25 s/d 27 SEPTEMBER 2025	Desa Muara Bengalon Kec. Bengalon
6	Festival Kampung Bahari Nusantara Pulau Miang	30 OKTOBER S/D 01 NOVEMBER 2025	Desa Pulau Miang Kec. Kaliorang
7	Festival Pesona Nusantara Embung Wisata Banyu Langit	20 S/D 22 NOVEMBER 2025	Desa Suka Maju Kec. Kongbeng
8	Festival Pekan Ekonomi Kreatif Kutai Timur	27 S/D 29 NOVEMBER 2025	Alun - alun Halaman Kantor Bupati Kutai Timur

Permasalahan dan Upaya Mengatasi yang dihadapi pada Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran antara lain :

1. Penyusunan Jadwal Event Festival Pariwisata yang ada di dalam tabel Rata-rata penganggarnya pada anggaran APBD-P sehingga persiapan dalam penyusunan jadwal pelaksanaan event masih belum maksimal.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya dalam Managemen Event Pariwisata, Jasa event organizer lokal masih terbatas
3. Perlunya kolaborasi antara semua stakeholder dalam mengemas sebuah event pariwisata baik itu antara sesama organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan swasta, pelaku ekonomi kreatif, komunitas pariwisata dan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama OPD : Dinas Pariwisata
Periode Realisasi : Desember 2025

Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Nama PPTK	Pagu (Rp)	Bobot (%)	Realisasi				Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Ket
					Fisik	Tertimbang Fisik (%)	Keuangan	Tertimbang Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16,403,444,874	57.97	93.50	161.30	88.81	153.21	14,567,407,799	1,836,037,075.00	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AKBAR ADITYA ERIKO	117,771,055	0.42	90.00	21625.47	72.02	17,304.32	84,814,500	32,956,555.00	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	AKBAR ADITYA ERIKO	108,480,055	0.38	90.00	23477.63	75.43	19676	81,824,500	26,655,555.00	
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	AKBAR ADITYA ERIKO	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-	
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	AKBAR ADITYA ERIKO	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-	
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	AKBAR ADITYA ERIKO	9,291,000	0.03	75.00	228433.79	32.18	98018	2,990,000.00	6,301,000.00	
3.26.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	AKBAR ADITYA ERIKO	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	AKBAR ADITYA ERIKO	13,586,594,563	48.01	92.00	191.62	88.09	183	11,969,091,476	1,617,503,087.00	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	AKBAR ADITYA ERIKO	13,276,785,063	46.92	88.07	187.72	88.07	188	11,693,391,076	1,583,393,987.00	
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	AKBAR ADITYA ERIKO	291,227,500	1.03	100	9716.93	93.91	9125	273,498,000	17,729,500.00	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	AKBAR ADITYA ERIKO	18,582,000	0.07	55.00	83759.06	11.85	18050	2,202,400.00	16,379,600.00	
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TRIPENA JALUNG	109,160,000	0.39	93.00	24109.10	83.55	21659	91,200,000	17,960,000.00	
3.26.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	TRIPENA JALUNG	8,415,000	0.03	90.00	302656.45	71.78	241374	6,040,000.00	2,375,000.00	
3.26.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TRIPENA JALUNG	65,602,000	0.23	100	43136.46	97.45	42038	63,932,000.00	1,670,000.00	
3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	TRIPENA JALUNG	35,143,000	0.12	90.00	72471.16	60.40	48640	21,228,000.00	13,915,000.00	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TRIPENA JALUNG	0	0.00	0	0.00	-	0	0	-	
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TRIPENA JALUNG	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-	
3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TRIPENA JALUNG	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-	

3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TRIPENA JALUNG	459,711,902	1.62	98.55	6066.42	93.80	5774	431,186,885	28,525,017.00
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TRIPENA JALUNG	14,286,000	0.05	0	0.00	-	0	-	14,286,000.00
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TRIPENA JALUNG	74,382,000	0.26	100	38044.66	100.00	38045	74,382,000	-
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TRIPENA JALUNG	79,224,000	0.28	100	35719.45	100.00	35719	79,224,000	-
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TRIPENA JALUNG	12,585,000	0.04	100	224857.99	100.00	224858	12,585,000	-
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TRIPENA JALUNG	49,197,500	0.17	100	57519.95	100.00	57520	49,197,500	-
3.26.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	TRIPENA JALUNG	23,504,000	0.08	100	120398.14	100.00	120398	23,504,000	-
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TRIPENA JALUNG	191,559,000	0.68	96.00	14181.76	92.57	13675	177,319,983	14,239,017.00
3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	TRIPENA JALUNG	14,974,402	0.05	100	188978.35	100.00	188978	14,974,402	-
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TRIPENA JALUNG	989,319,000	3.50	100	2860.39	88.88	2542	879,285,510	110,033,490.00
3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TRIPENA JALUNG	708,000,000	2.50	100	3996.95	84.58	3380	598,800,000.00	109,200,000.00
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	TRIPENA JALUNG	72,455,000	0.26	0	0.00	99.43	38832	72,039,000.00	416,000.00
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TRIPENA JALUNG	208,864,000	0.74	100	13548.71	99.80	13522	208,446,510	417,490.00
3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TRIPENA JALUNG	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TRIPENA JALUNG	879,099,590	3.11	100	3219.02	97.62	3142	858,190,028	20,909,562.00
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TRIPENA JALUNG	75,000,000	0.27	90.00	33958.05	75.45	28470	56,590,438	18,409,562.00
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TRIPENA JALUNG	804,099,590	2.84	100	3519.26	99.69	3508	801,599,580	2,500,000.00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TRIPENA JALUNG	261,788,764	0.93	100	10809.62	96.89	10473	253,639,400	8,149,364.00
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TRIPENA JALUNG	26,400,000	0.09	100	107190.83	72.95	78201	19,280,000	7,140,000.00
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TRIPENA JALUNG	235,388,764	0.83	100	12021.98	99.57	11970	234,379,400	1,009,364.00
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TRIPENA JALUNG	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-

3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		4,100,977,500	14.49	95.00	655.54	84.52	583	3,466,093,056	534,884,444.00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Suwardi Tandilawo	199,000,000	0.70	96.00	13651.48	89.83	12775	178,769,876	20,230,124.00
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Suwardi Tandilawo	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Suwardi Tandilawo	199,000,000	0.70	95.00	13509.28	89.83	12775	178,769,876.00	20,230,124.00
3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Suwardi Tandilawo	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Duarte Goncalves	3,812,372,500	13.47	90.00	668.05	84.13	625	3,207,499,180	604,873,320.00
3.26.02.2.03.0001	Pencapaian Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Duarte Goncalves	47,530,000	0.17	100	59537.93	95.63	56936	45,452,500.00	2,077,500.00
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Duarte Goncalves	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Duarte Goncalves	0	0.00	0	0.00	-	0	-	-
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Duarte Goncalves	3,024,034,000	10.69	100	935.78	99.01	927	2,994,068,005	29,995,995.00
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Duarte Goncalves	0	0.00	-	0.00	-	0	-	-
3.26.02.2.03.0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Duarte Goncalves	541,808,500	1.91	10.00	522.29	1.24	65	6,700,000	535,108,500.00
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Duarte Goncalves	199,000,000	0.70	90.00	12798.26	81.04	11525	161,278,675	37,721,325.00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Dra. Nusawati	89,605,000	0.32	100	31581.25	89.08	28134	79,824,000	9,781,000.00
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Dra. Nusawati	89,605,000	0.32	100	31581.25	89.08	28134	79,824,000	9,781,000.00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		1,720,449,000	6.08	100	1644.83	99.14	1631	1,705,649,001	14,796,999.00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	REZKI KRISDAYANTI SAPUTRI	1,720,449,000	6.08	100	1644.83	99.14	1631	1,705,649,001	14,796,999.00
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	REZKI KRISDAYANTI SAPUTRI	1,105,599,500	3.91	100	2559.55	99.55	2548	1,100,655,101	4,944,399.00
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	REZKI KRISDAYANTI SAPUTRI	614,849,500	2.17	100	4802.49	98.40	4529	604,993,900	9,855,600.00

3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		4,455,728,130	15.75	100	635.10	99.31	631	4,425,113,024	30,615,106.00
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		4,455,728,130	15.75	100	635.10	99.31	631	4,425,113,024	30,615,106.00
3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur	RINI WAHYUNI	84,883,840	0.30	100	33337.77	94.47	31495	80,191,846	4,691,984.00
3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemusatan	MUTASHIM BILLAH	4,193,858,000	14.82	100	674.76	99.45	671	4,170,784,599	23,073,401.00
3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	RESKIYANA	0	0.00	-	0.00	-	0	-	-
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	RINI WAHYUNI	33,660,000	0.12	100	84071.24	99.77	83879	33,582,990	77,010.00
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	RESKIYANA	143,326,290	0.51	100	19744.02	98.07	19362	140,553,589	2,772,701.00
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		1,617,779,000	5.72	100	1749.21	98.90	1730	1,599,961,950	17,817,050.00
3.26.04.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		440,310,000	1.56	100	6426.92	99.70	6408	439,007,200	1,302,800.00
3.26.04.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	ZULFIAH AFRIDHA	440,310,000	1.56	100	6426.92	99.70	6408	439,007,200	1,302,800.00
3.26.04.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		1,177,469,000	4.16	100	2403.32	98.60	2370	1,160,954,750	16,514,250.00
3.26.04.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	ZULFIAH AFRIDHA	1,177,469,000	17.15	100	583.09	98.60	575	1,160,954,750	16,514,250.00
		Jumlah	28,298,378,594.00	100.00	95.00	4845.98	91.04	4727.78	25,764,224,830.00	2,534,153,674.00

Keterangan :

1. Minimal progres realisasi fisik ≥ progres realisasi keuangan
2. Realisasi fisik diambil dari realisasi keuangan yang ada atau kegiatan barang dan jasa yang telah berproses bukan saat serah terima barang
3. Apabila terjadi perbedaan pagu Dokumen yang dijadikan acuan adalah DPA Perangkat Daerah yang telah di tanda tangani tim TAPD

Mengetahui,
Pdt/Kepala Dinas



Abdullah Rifanie, SE
NIP. 197110302000031007